

## Bab 8 Neraca Perdagangan: Pendekatan Analisis Parsial

Konsepsi kurva permintaan dan penawaran pasar dapat dipergunakan untuk menerangkan baik perdagangan antar-daerah maupun perdagangan antar-negara. Oleh karena konsepsi ini hanya memperhatikan sebagian kecil saja dari perekonomian, yaitu bahkan hanya memperhatikan satu komoditi saja, dan tidak memperhatikan sama sekali pantulan yang mungkin timbul dari sektor-sektor lainnya dalam perekonomian, maka pendekatan ini dapat dikategorikan sebagai *pendekatan parsial* atau lengkapnya '*partial equilibrium analysis*'.

Mula-mula akan diuraikan penggunaan model tersebut di atas untuk menerangkan perdagangan antar-daerah. Dengan memasukkan unsur kurs devisa ke dalam model tersebut berarti kita telah menerangkan penggunaan model analisis parsial untuk perdagangan antar-negara. Unsur biaya transpor, bea impor atau ekspor, subsidi impor atau ekspor, kurva permintaan impor dan penawaran ekspor, elastisitas serta kebijaksanaan devaluasi dan revaluasi pengaruhnya terhadap impor dan ekspor, akan dibahas pula dalam bab ini, juga dengan mempergunakan pendekatan ekuilibrium parsial.

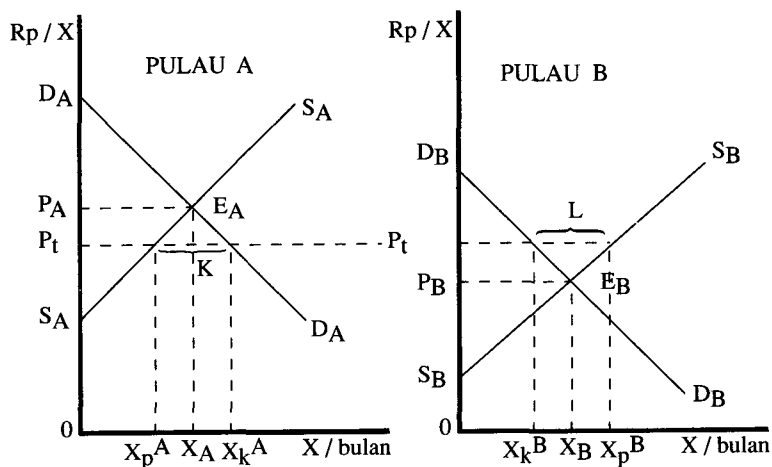
### 8.1. Perdagangan Antar-Daerah<sup>1)</sup>

Dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan antar daerah dalam hal jumlah penduduk, pendapatan masyarakat baik total, per kapita ataupun pendistribusiannya, kesukaan, selera atau cita rasa penduduk, keaneka-ragaman barang dan jasa yang tersedia, dan seterusnya, maka kiranya mudah dipahami bahwa kurva permintaan pasar akan barang yang sama tendensinya berbeda-beda antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Untuk mudahnya kita misalkan suatu negara terdiri dari dua pulau, yaitu pulau A dan pulau B, yang mula-mula sama sekali tidak ada kontak atau hubungan di antara masyarakat kedua pulau tersebut. Pada gambar 8.1.1. kita gambar *kurva permintaan pasar* masyarakat pulau A akan barang  $D_A$   $D_A$ , sedangkan kurva yang serupa untuk masyarakat pulau B kita tandai  $D_B$   $D_B$ .

Seperti halnya dengan kurva permintaan, kurva penawaran pasar akan suatu barang juga tendensinya berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya baik kuantitas, kualitas maupun komposisi sumber-sumber daya yang ada di daerah yang satu berbeda dengan yang ada di daerah lain. Pada Gambar 8.1.1.

<sup>1)</sup>Disunting dari Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Mikro : Perilaku Harga Pasar dan Konsumen*, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 74 - 77.

kurva penawaran pasar akan barang X untuk penduduk pulau A digambar sebagai kurva  $S_A$ , sedangkan untuk penduduk pulau B sebagai kurva  $S_B$ .



**Gambar 8.1.1. : PERDAGANGAN ANTAR DAERAH : PENDEKATAN EKUILIBRIUM PARSIAL**

Kalau misalnya mula-mula sama sekali tidak ada kontak antara penduduk pulau A dengan penduduk pulau B. Dalam keadaan demikian maka keadaan ekuilibrium pasar di pulau A dan di pulau B akan terbentuk dengan nilai-nilai ekuilibrium :

1. Di pulau A :
  - (a) harga ekuilibrium barang X =  $OP_A / X$
  - (b) jumlah konsumsi barang X =  $OX_A$  /bulan
  - (c) jumlah produksi barang X =  $OX_A$  /bulan.
  
2. Di pulau B :
  - (a) harga ekuilibrium barang X =  $OP_B / X$
  - (b) jumlah konsumsi barang X =  $OX_B$  /bulan
  - (c) jumlah produksi barang X =  $OX_B$  /bulan.

Dari contoh di atas jelas bahwa dalam keadaan tertutup, yaitu tidak ada hubungan dagang dengan daerah lain, dalam keadaan ekuilibrium jumlah produksi selalu sama dengan jumlah konsumsi.

Sekarang kita tinjau apa yang terjadi kalau suatu ketika terbentuk kontak antara penduduk pulau A dengan penduduk pulau B ? Dengan sendirinya dengan adanya kontak tersebut para konsumen di pulau A akan mengetahui bahwa harga barang X di pulau B lebih

rendah bila dibandingkan dengan harga barang X di pulau tempat kediamannya sendiri, sehingga mereka akan berusaha untuk membeli barang X dari pulau B. Sebaliknya yang terjadi di pulau B ialah bahwa harga satuan barang X di pulau A lebih tinggi daripada harga per satuan barang X di pulau tempat tinggal mereka. Oleh karena itu para produsen di pulau B, didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, akan berusaha menjual hasil produksinya berupa barang X ke pulau A. Oleh karena keinginan para konsumen di pulau A untuk membeli barang X dari pulau B mempunyai sifat komplementer dengan keinginan para produsen di B untuk menjual hasil produksinya ke pulau A, maka kiranya mudah dipahami kalau kemudian terjadi jual beli barang X antara penduduk pulau B dengan penduduk pulau A.

Terjadinya transaksi jual beli barang X antara penduduk pulau A dengan penduduk pulau B yang berupa mengalirnya barang X dari pulau B ke pulau A, mengakibatkan di satu pihak bertambahnya jumlah barang X yang dapat dibeli oleh para konsumen di pulau A, di lain pihak di pulau B terjadi pengurangan jumlah barang X yang dapat dibeli oleh konsumen setempat. Sebagian akibat dari kejadian ini maka harga barang X di pulau A mempunyai tendensi untuk turun sedangkan di pulau B bertendensi untuk naik.

Akibat selanjutnya ialah, dikarenakan oleh menurunnya harga barang X di pulau A, maka jumlah barang X yang oleh para konsumen pulau A ingin dan sanggup untuk membelinya untuk dikonsumsi bertambah. Kejadian yang sebaliknya terjadi di pulau B. Sebagai akibat meningkatnya harga barang X di pulau B, maka kesediaan para konsumen untuk membeli barang X akan menurun.

Produsen di lain pihak memberikan reaksi yang berkebalikan dengan reaksi para konsumen. Sebagai akibat menurunnya harga barang X di pulau A maka produsen barang X di pulau A akan mengurangi produksinya. Sebaliknya para produsen di pulau B; melihat harga pasar barang yang dihasilkan naik, kesediaan mereka untuk menghasilkan barang X meningkat.

Sebagai akibat bertambahnya konsumsi dan berkurangnya produksi barang X di pulau A menyebabkan adanya kelebihan konsumsi dari produksi. Sebaliknya di pulau B di mana terdapat peningkatan produksi dan penurunan konsumsi akan terjadi kelebihan produksi di atas konsumsi. Mudahlah kiranya dipahami bahwa kelebihan konsumsi barang X di pulau A akan dipenuhi dari pengiriman kelebihan produksi di pulau B.

Proses perubahan di atas, yaitu perubahan harga, perubahan kuantitas yang dihasilkan dan perubahan kuantitas yang dikonsumsi untuk barang X, baik pulau A maupun pulau B akan berjalan terus dan akan berhenti hanya apabila jumlah kelebihan produksi barang X di pulau B telah sama dengan jumlah atau kuantitas kelebihan konsumsi barang X oleh penduduk pulau A. Dalam contoh Gambar 8.1.1. perubahan-perubahan tersebut di atas terhenti pada ketinggian harga baik di pulau A maupun di di pulau B untuk barang X per unit setinggi OP, sebab pada ketinggian harga tersebut besarnya kelebihan konsumsi barang X di pulau A, yang dapat pula disebut supply deficiency, kekurangan penawaran atau kelebihan permintaan barang X sebesar K sama dengan besarnya kelebihan penawaran barang X, yang biasa juga disebut adanya excess supply atau adanya surplus barang X di negara B, yang besarnya sama dengan L.

Perlu di sini diketengahkan bahwa kesamaan harga ekuilibrium barang X di *daerah minus* barang X pulau A dengan harga ekuilibrium barang X di *daerah surplus* barang X pulau B adalah didasarkan kepada asumsi bahwa untuk memindahkan barang X dari pulau B ke pulau A, atau sebaliknya, sama sekali tidak dibutuhkan pengeluaran biaya transpor.<sup>2)</sup>

Setelah kita menemukan harga ekuilibrium barang X yang baru, yaitu setinggi OP, baik di pulau A maupun di pulau B, maka kita akan dapat mengetahui pula besarnya produksi dan konsumsi barang X tersebut baik di A maupun di B. Di pulau A, jumlah produksi ekuilibrium barang X sebesar  $OX^A_p$ , dan jumlah konsumsi ekuilibrium barang X sebesar  $OX^A_k$ . Di pulau B jumlah produksi ekuilibrium barang X sebesar  $OX^B_p$  unit dan jumlah konsumsi ekuilibrium untuk barang yang sama sebanyak  $OX^B_k$ .

Dari contoh di atas jelas kita saksikan bahwa :

1. untuk daerah surplus berlaku : produksi *minus* penjualan ke daerah lain sama dengan konsumsi;
2. untuk daerah minus berlaku : produksi *plus* pembelian dari daerah lain sama dengan konsumsi.<sup>3)</sup>

## 8.2. Perdagangan Antar-Bangsa

Analisa permintaan dan penawaran yang dipergunakan untuk menerangkan perdagangan antar-daerah seperti diuraikan di atas sepenuhnya berlaku juga untuk *perdagangan antar bangsa*, yang kita sebut juga *perdagangan antar-negara* atau *perdagangan internasional*. Perbedaan jumlah penduduk, perbedaan pendapatan, perbedaan kesukaan, dan perbedaan keaneka-ragaman barang dan jasa yang tersedia bagi konsumen menyebabkan permintaan pasar akan suatu barang berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lain. Di lain pihak apa yang biasa disebut *factor endowment*, yaitu kuantitas, kualitas dan komposisi sumber-sumber daya, berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain menyebabkan kurva penawaran pasar akan suatu barang atau jasa juga berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dari kesamaan-kesamaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis perdagangan antar daerah yang menggunakan konsepsi permintaan dan penawaran sepenuhnya dapat dipergunakan untuk menerangkan perdagangan antar negara.

Di samping sifat-sifat yang sama seperti disebutkan di atas ada dua hal pokok yang banyak dijumpai dalam lalu-lintas perdagangan antar-bangsa tetapi jarang kita jumpai dalam lalu-lintas perdagangan antar-daerah yaitu :

1. *Mata uang* yang berlaku di negara pengimpor pada umumnya berbeda dengan mata uang yang berlaku di negara pengekspor. Kenyataan ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah, seperti misalnya : kurs devisa, risiko perubahan kurs devisa, cadangan valuta asing dan lain-lain lagi.

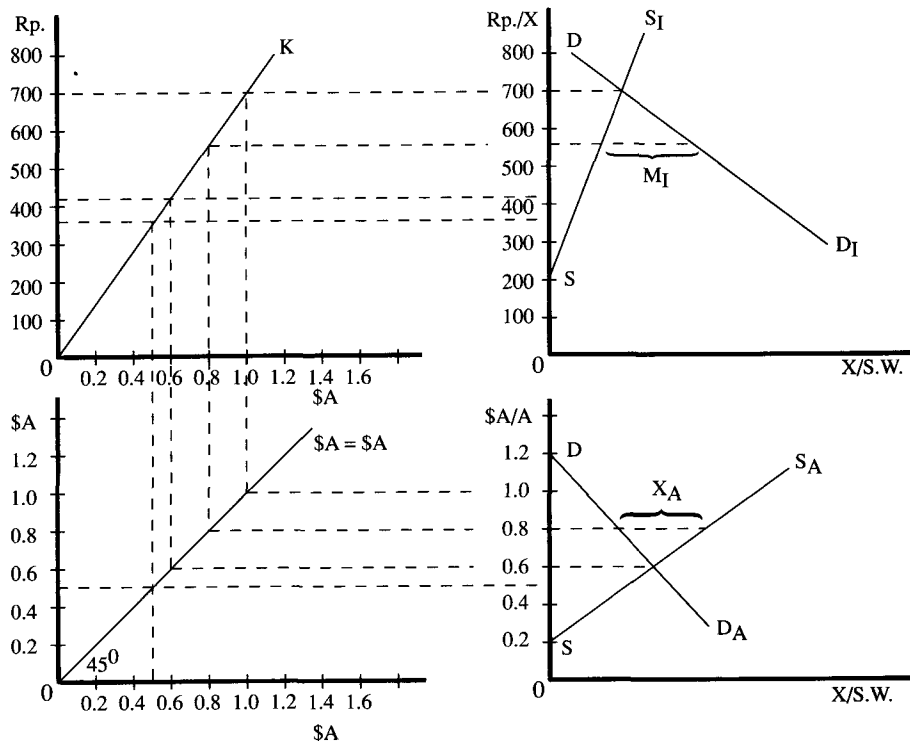
<sup>2)</sup>Model analisis yang memperhatikan unsur biaya transpor disajikan pada Sub-bab 8.5. Lihat hal. 7.18 - 7.24.

<sup>3)</sup>Kedua pernyataan ini dengan sendirinya didasarkan pada asumsi dari waktu ke waktu tidak ada perubahan persediaan barang bersangkutan.

2. *Kebijakan pemerintah*, seperti misalnya, bea atau tarif, kuota, subsidi dan sebagainya, banyak dikenakan pada perdagangan antar daerah. Uraian lebih lanjut mengenai hal ini akan disajikan pada sub-bab berikutnya.

Telah disebutkan bahwa sebagai akibat berbedanya mata uang yang digunakan di negara pengimpor dengan yang digunakan di negara pengekspor timbul berbagai masalah, antara lain ialah kurs valuta. Kurs valuta asing merupakan harga valuta asing per satuan uang dasar dinyatakan dalam mata uang negara bersangkutan. Kalau misalnya dikatakan bahwa kurs dollar Australia setinggi Rp 700,- maka kalau seorang importir ingin melunasi hutangnya sebesar \$A 100, ia harus mengeluarkan uang rupiah sebanyak Rp 70.000,- untuk dibelikan dollar Australia, yang kemudian dikirimkan kepada pihak eksportir di Australia.

Apabila kita ingin menggunakan model analisis perdagangan antar-daerah dengan menggunakan konsepsi permintaan dan penawaran untuk menerangkan perdagangan antar negara, kita perlu memasukkan unsur kurs valuta ke dalam model analisis kita. Untuk maksud ini kita perhatikan Gambar 8.2.1. Kuadran ke I, yang dapat juga disebut *kuadran timur-laut*, kita pergunakan untuk menggambarkan kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar akan barang X untuk perekonomian Indonesia, yang oleh karenanya sumbu harga itu ditandai dengan Rp/X. Kuadran ke II, atau *kuadran tenggara*, kita pergunakan untuk menggambarkan kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar akan barang X untuk perekonomian Australia, yang oleh karenanya sumbu harganya kita tandai dengan \$A/X, Kuadran ke III, yaitu *kuadran barat-daya* hanya kita pergunakan sebagai garis *pertolongan* yang dapat memindahkan nilai \$A yang diukur dengan menggunakan sumbu \$A vertikal ke sumbu \$A horisontal tanpa mengubah nilainya. Dengan demikian, garis pertolongan tersebut harus mempunyai sudut  $45^\circ$ . Akhirnya, kuadran ke IV, yang dapat pula kita sebut sebagai *kuadran barat-laut*, kita pergunakan untuk menunjukkan tingginya kurs valuta asing, yang dalam contoh kita adalah kurs dollar Australia. Garis OK kita sebut *garis kurs*. Garis kurs ini mempunyai sudut yang besar-kecilnya tergantung pada tinggi-rendahnya kurs valuta asing yang berlaku dan juga pada ukuran skala yang dipakai oleh sumbu \$A dan sumbu Rp. Dengan kurs Rp 700,-/\$A, yang dapat pula diungkapkan dengan  $\$A 1 = \text{Rp } 700,-$ , maka apabila untuk satu kotak pada sumbu \$A menunjukkan nilai \$A 0.20 sedangkan untuk satu kotak dengan panjang yang sama pada sumbu Rp menunjukkan nilai Rp 100,-, maka pada Gambar 8.2.1. garis kurs dollar Australia lawan rupiah terlihat sebagai garis kurs OK. Apabila, kita ingin mengetahui berapa nilai \$A 0.50 dinyatakan dalam rupiah, maka yang harus kita lakukan ialah mula-mula mencari titik \$A 0.50 pada skala sumbu \$A. Titik ini kita bawa ke atas hingga sampai pada garis kurs OK. Titik yang kita temukan ialah titik k. Dari titik k ini kita bawa mendatar hingga sampai pada sumbu Rp. Pada sumbu Rp ini titik yang kita temukan mempunyai nilai Rp 350,-. Ini berarti bahwa uang Australia sebanyak \$A 0.50 dengan kurs yang berlaku mempunyai nilai yang sama dengan Rp 350,-. Kalau kita ingin mengetahui nilai sejumlah uang rupiah dinyatakan dalam \$A, apa yang kita lakukan adalah persis kebalikannya.



**Gambar 8.2.1. : PERDAGANGAN ANTAR-BANGSA**

Dengan kurva permintaan masyarakat Indonesia akan barang X digambarkan sebagai kurva  $DD_I$ , dan kurva penawaran masyarakat Indonesia akan barang X sebagai kurva  $SS_I$ . Dan di lain pihak kurva permintaan masyarakat Australia digambarkan sebagai kurva  $DD_A$  sedangkan kurva penawarannya digambarkan sebagai kurva  $SS_A$  maka dengan melalui garis kurs dan garis pertolongan  $\$A = \$A$ , kita dapat mencoba-coba menemukan titik ekuilibrium perdagangan barang X antara negara Indonesia dengan negara Australia.

Dari gambar dapat disaksikan bahwa sebelum adanya perdagangan, harga ekuilibrium barang X di Indonesia adalah Rp 700/X, yang kalau dinyatakan dalam satuan uang Australia, yaitu dengan jalan memproyeksikan pada sumbu  $\$A$  melalui garis kurs OK, mempunyai nilai sama dengan satu dollar Australia. Harga ekuilibrium barang X di Australia, di lain pihak, adalah setinggi  $\$A$  0.60, yang mempunyai nilai ekuivalen Rp 420,-.

Melihat harga yang lebih tinggi di Indonesia, para produsen barang X di Australia tertarik untuk menjual hasil produksinya ke Indonesia. Sebaliknya para konsumen di Indonesia melihat bahwa di Australia harga barang X hanya setinggi Rp 420,-/X tertarik untuk membeli barang tersebut dari Australia. Sebagai akibatnya timbul perdagangan, di mana Australia bertindak sebagai negara pengekspor, dan Indonesia bertindak sebagai negara pengimpor. Sebagai akibat dari transaksi perdagangan tersebut di negara pengekspor, yaitu dalam hal ini

negara Australia, harga barang X tersebut naik. Di lain pihak di negara pengimpor yaitu dalam contoh kita negara Indonesia, harga barang X turun. Selama masih terjadi jumlah yang ingin diimpor oleh Indonesia lebih banyak dari jumlah kesanggupan negara pengekspor untuk mengekspornya maka harga barang X di Australia bertendensi naik, sebaliknya di negara mengimpor bertendensi turun. Akan tetapi bila yang terjadi sebaliknya, yaitu di mana jumlah kesediaan mengekspor dari negara pengekspor lebih besar daripada jumlah kesediaan pengimpor untuk mengimpornya, harga di negara pengekspor akan turun dan di negara pengimpor harga barang X tersebut akan naik. Keadaan ekuilibrium terjadi apabila pada keadaan di mana pada harga barang yang berlaku, jumlah kesediaan negara pengekspor untuk mengekspornya sama dengan jumlah kesediaan negara pengimpor untuk mengimpornya. Dalam contoh di atas, ekuilibrium terjadi pada harga sekitar Rp 560,-/X atau \$A 0.80/X. Pada harga-harga tersebut, negara Indonesia mengimpor barang X sebanyak  $M_I$ , yang jumlahnya sama dengan yang diekspor Australia, yaitu sebanyak  $X_A$ .

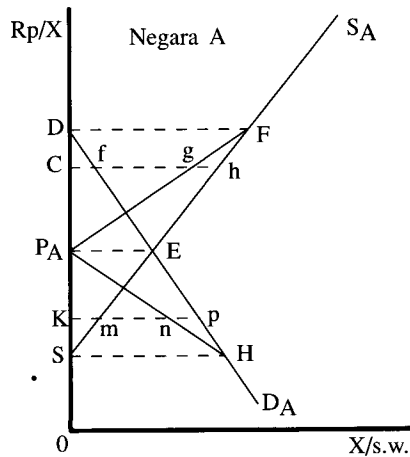
Dengan sendirinya contoh-contoh di atas didasarkan pada asumsi tidak adanya ongkos transpor dan tidak adanya campur tangan pemerintah, yang berupa tarif, subsidi dan kuota. Asumsi-asumsi yang tidak realistis ini nantinya satu demi satu akan ditinggalkan.

### 8.3. Permintaan Impor dan Penawaran Ekspor

Model analisis perdagangan antar negara dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran pasar seperti diuraikan di atas agak sukar digunakan untuk menggambarkan masalah *elastisitas*. Pada hal nanti kita akan menyaksikan bahwa banyak kebijakan ekonomi luar negeri pemerintah mengenai keberhasilannya sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya elastisitas penawaran ekspor. Masalah tersebut sedikit dapat teratasi apabila untuk persoalan yang sama diuraikan dengan menggunakan konsepsi *permintaan impor* dan *penawaran ekspor*.

Dari setiap pasang kurva permintaan pasar dan penawaran pasar dapat diturunkan kurva permintaan impor dan kurva penawaran ekspor. Perhatikan saja Gambar 8.3.1. Pada gambar tersebut negara A mempunyai sepasang kurva permintaan pasar dan penawaran pasar barang X yang berturut-turut digambarkan sebagai kurva  $DD_A$  dan  $SS_A$ . Dari pasangan kurva ini dapat diturunkan:

1. *Kurva permintaan impor negara A akan barang X*. Kurva ini dapat pula disebut sebagai kurva permintaan negara A akan barang X buatan luar negeri. Kurva tersebut merupakan kurva yang menunjukkan kuantitas-kuantitas barang X yang masyarakat negara A ingin dan sanggup untuk mengimpornya dari negara lain pada berbagai kemungkinan harga barang X tersebut. Dalam gambar yang dimaksud dengan kurva permintaan impor barang X negara tersebut ialah kurva  $P_A HD_A$ .
2. *Kurva penawaran ekspor barang X negara A*. Kurva ini menunjukkan jumlah-jumlah barang X yang masyarakat negara A ingin dan sanggup untuk mengekspornya ke negara lain pada berbagai kemungkinan harga barang X. Kurva penawaran barang ekspor yang dimaksud ialah kurva  $P_A FS_A$ .



**Gambar 8.3.1.: KURVA PERMINTAAN IMPOR DAN KURVA PENAWARAN EKSPOR**

Dasar pemikiran dari penurunan kedua kurva tersebut ialah sebagai berikut. Pertama kita menggunakan asumsi bahwa barang X yang dihasilkan oleh negara A identik dengan barang X yang dihasilkan oleh negara lain. Apabila harga barang X buatan negara lain setinggi  $OP_A$ , maka tidak ada gunanya bagi masyarakat negara A untuk mengimpor maupun mengekspor barang X tersebut, oleh karena bagi konsumen, membeli barang X buatan dalam negeri sama menguntungkannya dengan membeli barang X buatan luar negeri. Demikian juga bagi produsen, tidak ada gunanya untuk menjual hasil produksinya ke luar negeri, sebab harga jualnya di dalam negeri sama dengan di luar negeri, dan pada harga tersebut jumlah kesediaan produsen dalam negeri untuk menghasilkan barang X, yaitu sebanyak  $P_A E$  persis sama dengan jumlah keinginan konsumen dalam negeri untuk mengkonsumsinya. Oleh karena itu, kiranya mudah dipahami kalau titik  $P_A$  adalah merupakan titik pangkal kurva permintaan impor barang X maupun juga titik pangkal bagi kurva penawaran ekspor barang yang sama.

Sekarang, kalau masyarakat negara A menemukan harga barang X di negara lain lebih rendah daripada  $OP_A$ , misalnya saja hanya setinggi  $OK$ , maka mengingat bahwa barang X buatan luar negeri tidak berbeda dengan barang x buatan dalam negeri, maka tendensinya harga barang X di negara A akan menurun ke arah ketinggian yang sama dengan harga barang X di negara B. Dengan harga setinggi  $OK/X$ , masyarakat konsumen negara A akan bersedia untuk membeli untuk kemudian dikonsumsi barang X sebanyak  $Kp$ , sedangkan para produsen keseluruhannya bersedia menjual sebanyak  $Km$ . Oleh karenanya negara A perlu mengimpor barang X sebanyak  $mp$ . Jadi besarnya impor sama dengan konsumsi ( $Kp$ ) minus produksi ( $Km$ ). Impor barang X sebanyak  $mp$  tersebut, kalau kita ukurkan dari titik K ke kanan akan menemukan titik n. Dengan perkataan lain, panjang  $Kn$  sama dengan panjang  $mp$ .

Dengan demikian, maka garis permintaan impor barang X untuk negara A tentu akan melewati titik n. Oleh karena kurva permintaan pasar  $DD_A$  dan kurva penawaran pasar  $SS_A$  keduanya merupakan garis lurus, maka kalau ditarik garis lurus dari titik  $P_A$  melalui titik n akan bertemu dengan garis  $DD_A$  pada titik H. Titik H ini tingginya sama dengan OS, yang merupakan titik pertemuan antara kurva penawaran pasar  $SS_A$  dengan sumbu harga Rp/X. Dengan harga barang X setinggi OS atau lebih rendah dari OS, tidak ada lagi produsen dalam negeri yang sanggup menghasilkan barang X, oleh karena harga jualnya yang terlampaui rendah. Ini berarti bahwa semua kebutuhan akan barang X harus didatangkan dari luar negeri. Oleh karena itulah maka kurva permintaan impor barang X mulai dari titik H ke bawah, berimpit dengan kurva permintaan pasar barang X. Dengan demikian jelaslah bahwa kurva permintaan impor barang X negara A bergerak dari  $P_A$  ke H, lalu ke  $D_A$ .

Sekarang bagaimana kalau harga di luar negeri lebih tinggi dari  $OP_A$ ? Misalnya saja harga yang lebih tinggi tersebut adalah OC. Pada harga OC jumlah barang X yang oleh para produsen dalam negeri sanggup untuk menghasilkan dan menjualnya adalah sebanyak Ch, sedangkan jumlah yang diinginkan oleh pembeli untuk dikonsumsi hanya sebanyak Cf. Dengan demikian terdapat kelebihan produksi sebanyak fh, yang kalau kita ukur dari titik C akan menghasilkan titik g, harus dijual ke luar negeri. Dengan menarik garis yang dimulai dari titik  $P_A$  melalui titik g, kita menemukan *kurva penawaran ekspor* barang X. Kurva ini bertemu dengan kurva permintaan pasar  $SS_A$  pada titik F yang tingginya sama dengan OD. Titik OD ini merupakan titik pertemuan antara kurva permintaan pasar  $DD_A$  dengan sumbu harga Rp/X. Pada harga setinggi OD atau lebih tinggi dari OD, konsumen dalam negeri tidak sanggup lagi untuk membeli atau mengkonsumsi barang X, oleh karena harganya yang sudah terlampaui mahal. Ini berarti bahwa mulai harga OD ke atas, semua produksi barang X di negara A harus diekspor. Kalau dinyatakan dalam kurva penawaran ekspor, maka hal tersebut mempunyai makna bahwa mulai dari titik F ke atas, kurva penawaran ekspor barang x berimpit dengan kurva penawaran pasar  $SS_A$ .

Jadi jelaslah kiranya bahwa negara A yang mempunyai kurva penawaran pasar akan barang X  $SS_A$  dan kurva permintaan pasar akan barang X  $DD_A$  mempunyai *kurva penawaran ekspor barang X* :  $P_A FS_A$ .

Untuk menerangkan transaksi perdagangan antara negara A dengan negara B kita perhatikan Gambar 8.3.2. Pada gambar tersebut  $P_A FS_A$  dan  $P_A HD_A$  kita ambilkan dari Gambar 8.3.1., yaitu berturut-turut kurva penawaran ekspor barang X negara A dan kurva permintaan impor barang X negara A. Kurva  $P_B LS_B$  di lain pihak, merupakan kurva penawaran ekspor barang X negara B dan  $P_B MD_B$  merupakan kurva permintaan impor barang yang sama negara B, yang sumbu harganya sudah dirupiahkan.<sup>4)</sup>

Oleh karena semua kurva-kurva tersebut di atas telah tergambar pada kuadran yang sama, maka kita langsung dapat mencari nilai-nilai ekuilibrium. Yaitu, antara lain : harga ekuilibrium barang X, ekspor ekuilibrium, impor ekuilibrium, konsumsi ekuilibrium dan

<sup>4)</sup>Uraian dengan menggunakan mata uang yang berbeda disajikan pada Sub-bab 8.7. Lihat hal. 7.28 - 7.34.

produksi ekuilibrium barang X. Untuk ini semua pertama-tama yang harus kita lakukan ialah menemukan titik potong antara kurva permintaan impor barang X negara yang satu dengan kurva penawaran ekspor negara yang satunya lagi. Dengan sendirinya ini menggunakan asumsi bahwa tidak ada ongkos transpor dan juga tidak ada campur tangan pemerintah dalam bentuk, misalnya bea, subsidi dan kuota.<sup>5)</sup>

Meskipun pada gambar mungkin dijumpai beberapa garis yang saling berpotongan, namun titik potong ekuilibrium yang dimaksud di atas hanya ada satu. Dalam contoh Gambar 8.3.2., titik potong ekuilibrium tersebut ialah titik E. Titik ini merupakan titik ekuilibrium dari mana dapat kita temukan:

1. Harga ekuilibrium barang X di negara A dan di negara B sama, yaitu setinggi  $OP^*$ .
2. Mengingat bahwa titik E merupakan bagian dari *kurva penawaran ekspor* barang X negara A, yaitu kurva  $P_A FS_A$ , maka berarti bahwa negara A yang merupakan negara pengekspor barang X dengan jumlah per satuan waktunya  $P^*E$  unit. Jumlah ini nilainya dalam rupiah seharga Rp ( $OP^* \times P^*E$ )
3. Mengingat bahwa titik E juga merupakan bagian dari *kurva permintaan impor* barang X negara B,  $P_B MD_B$ , maka berarti negara B merupakan negara pengimpor barang X dengan jumlah per satuan waktunya  $P^*E$  unit juga, yang kalau dinyatakan dalam rupiah juga sebesar Rp ( $OP^* \times P^*E$ ).

Beberapa nilai variabel-variabel lainnya, secara singkat dapat ditunjukkan :

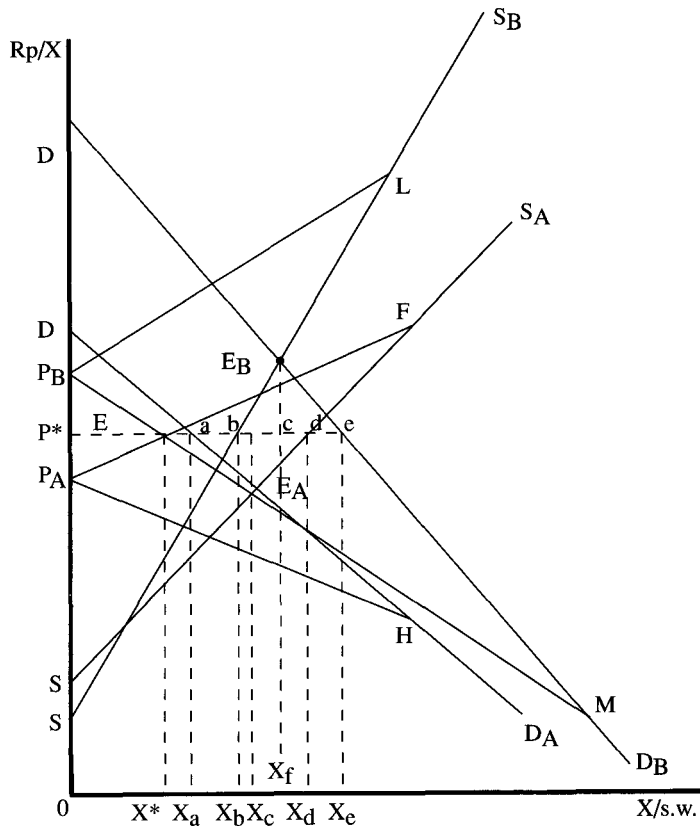
1. Produksi barang X negara A :  $P^*d$  atau  $OX_d$  atau  $(P^*a + P^*E)$
2. Konsumsi barang X negara A :  $P^*a$  atau  $OX_a$  atau  $(P^*d - P^*E)$
3. Produksi barang X negara B :  $P^*b$  atau  $OX_b$  atau  $(P^*e - P^*E)$
4. Konsumsi barang X negara B :  $P^*e$  atau  $OX_e$  atau  $(P^*b + P^*E)$

#### 8.4. Masalah Elastisitas

Dalam dunia ekonomi, dalam bidang manapun para ahli ekonomi pada umumnya tidak melupakan besarnya peranan elastisitas, baik elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Ilmu ekonomi internasional juga tidak merupakan pengecualian. Dalam bidang ekonomi internasional banyak masalah yang kunci pemecahannya terletak pada masalah elastisitas. Misalnya saja untuk meramalkan : Apakah subsidi ekspor akan berhasil meningkatkan hasil penerimaan devisa; masalah elastisitas akan tampil ke depan. Apakah tindakan pemerintah menaikkan kurs valuta asing, yaitu yang bisa disebut *devaluasi* akan mengakibatkan meningkatnya atau menurunnya jumlah valuta asing yang kita terima; pertimbangan elastisitas tidak dapat dielakkan.

Mengingat akan pentingnya masalah elastisitas tersebut banyak para ahli yang terdorong untuk mengadakan studi empiris mengenai elastisitas. Dalam buku ini kita tidak bermaksud menerangkan hal tersebut, melainkan sekedar mengingatkan bahwa kurva permintaan yang relevan bagi eksportir barang X, misalnya, bukanlah kurva permintaan dunia akan barang X,

<sup>5)</sup>Uraian dengan memperhatikan unsur kebijakan bea dan subsidi disajikan pada Sub-bab 8.6. Lihat hal. 7.24 - 7.28.



**Gambar 8.3.2.: PERDAGANGAN ANTAR DUA NEGARA DENGAN KONSEPSI PERMINTAAN IMPOR DAN PENAWARAN EKSPOR.**

bukan pula kurva permintaan sisa dunia akan barang X, melainkan *kurva permintaan sisa dunia akan barang X yang ditawarkan oleh para pengeksport negara bersangkutan*. Ketiga macam permintaan ini elastisitasnya dapat berbeda sekali, sehingga apabila kita salah dalam merumuskan permintaan yang ingin kita hitung elastisitasnya, hasil perhitungannya dapat menyesatkan para pembuat kebijakan ekonomi luar negeri.

Untuk perekonomian yang sumbangan hasil produksinya sangat kecil bila dibandingkan dengan hasil produksi dunia, misalnya saja produksi emas di Indonesia, perbedaan antara *kurva permintaan dunia* dengan *kurva permintaan sisa dunia* akan barang tersebut tidak begitu mempunyai arti. Akan tetapi untuk perekonomian yang *bagian pasar* atau *market share*-nya besar, perbedaan tersebut perlu mendapatkan perhatian. Kurva permintaan sisa dunia yang dihadapinya tidak lagi berbentuk horisontal sejajar dengan sumbu kuantitas.

Lebih penting dari perbedaan antara permintaan sisa dunia dengan permintaan dunia,

ialah perbedaan antara kedua permintaan tersebut di satu pihak dengan kurva permintaan sisa dunia akan barang yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, di lain pihak.

Dari Gambar 8.3.1. dapat kita saksikan bahwa sepanjang kemungkinan harga yang terdapat pada kurva penawaran, kurva permintaan impor lebih elastik dibandingkan dengan kurva permintaan pasar dari mana kurva permintaan impor kita turunkan. Hal ini disebabkan oleh karena untuk menurunkan kurva permintaan impor, kurva permintaan pasar kita kurangi dengan kurva penawaran pasar. Demikian juga halnya dengan kurva penawaran ekspor untuk semua kemungkinan harga yang terdapat pada kurva permintaan pasar dalam negeri juga lebih elastik bila dibandingkan dengan kurva penawaran pasar dari mana kurva penawaran ekspor tersebut kita turunkan.

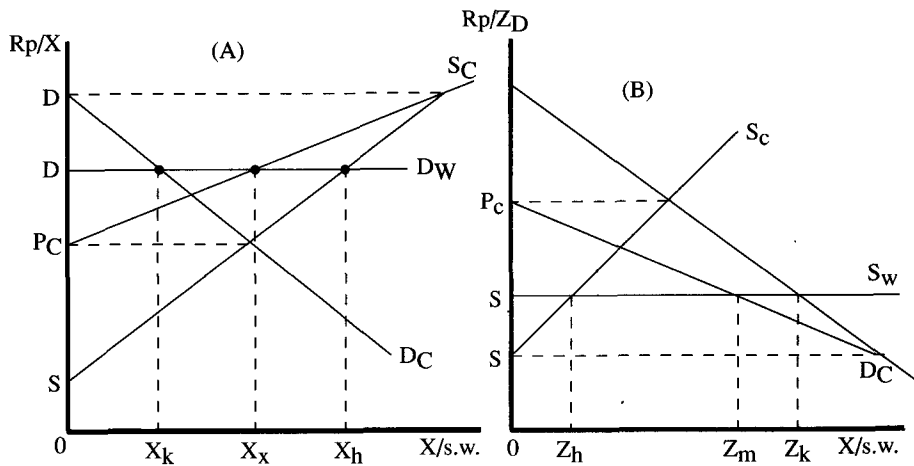
Kalau kita ingin menganalisis ekspor suatu barang, yang kita perhatikan adalah *kurva penawaran ekspor* barang tersebut dan *kurva permintaan sisa dunia akan barang yang sama yang relevan* bagi negara tersebut. Kurva yang kita sebutkan belakangan ini merupakan hasil pengurangan kurva permintaan sisa dunia akan barang tersebut terhadap kurva penawaran sisa dunia akan barang yang sama. Pada umumnya, terutama bagi negara yang *market share* atau *pangsa pasarnya* di pasar dunia sangat kecil, yaitu yang bias diistilahkan sebagai *negara kecil* atau *small country* untuk kurva yang kita maksudkan paling akhir, elastisitasnya sangat tinggi, kalau tidak bahkan elastis sempurna.

Sekarang apabila kita ingin menganalisa impor suatu barang, maka kurva-kurva yang perlu kita perhatikan adalah *kurva permintaan impor* barang tersebut dan *kurva penawaran sisa dunia akan barang tersebut yang dapat kita impor*; dan bukan kurva permintaan atau kurva penawaran macam lainnya.

Sekali lagi kurva permintaan ekspor adalah lebih elastik daripada kurva permintaan pasar dari mana kurva permintaan impor kita turunkan. Meskipun penawaran sisa dunia akan suatu barang inelastik, bisa terjadi juga kurva penawaran sisa dunia akan barang tersebut yang dapat kita impor adalah sangat elastik, yaitu terutama apabila jumlah impor kita akan barang tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah transaksi jual-beli barang tersebut di pasar dunia.

Pada Gambar 8.4.1., gambar (A) menggambarkan kasus di mana perekonomian C menghadapi permintaan sisa dunia akan barang X buatan C yang elastik sempurna. Kurva  $DD_w$  merupakan kurva tersebut yang sudah dijabarkan ke dalam rupiah. Dengan data seperti yang terlihat pada gambar, negara C mengekspor barang X per satuan waktunya sebanyak  $OX_x$  unit, mengkonsumsi barang X sebanyak  $OX_k$  unit, dan menghasilkan barang yang sama sebanyak  $OX_h$  unit.

Pada gambar (B) digambarkan perekonomian C juga menghadapi kurva penawaran sisa dunia akan barang Z yang bisa diimpor oleh negara C, yang elastisitasnya tidak terhingga. Dengan kurva penawaran seperti ini, yang dalam Gambar 8.4.1. (B) tergambar sebagai kurva  $SS_w$ , perekonomian negara C akan mengimpor barang Z sebanyak  $OZ_m$ , mengkonsumsi sebanyak  $OZ_k$ , dan menghasilkan sebanyak  $OZ_h$ . Mengenai soal istilah dapat dicatat bahwa dengan Gambar A, negara C disebut sebagai *negara pengekspor* (barang X) *kecil* dan dengan gambar B negara C disebut sebagai *negara pengimpor* (barang Z) *kecil*.



Gambar 8.4.1.: **EKSPOR DAN IMPOR DENGAN PANGSA PASAR YANG SANGAT KECIL DI PASAR DUNIA.**

### 8.5. Biaya Transpor

Sampai kini kita masih menggunakan asumsi bahwa transaksi perdagangan antar-daerah ataupun antar-negara tidak menyangkut biaya apa pun kecuali harga barang yang diperdagangkannya itu sendiri. Ini dengan sendirinya merupakan asumsi yang sama sekali tidak realistis.

Dari uraian-uraian sebelumnya, kita mengetahui bahwa tidak bisa diharapkan bahwa kurva permintaan pasar dua negara akan sama, dan juga tidak dapat diharapkan kurva penawaran pasar untuk barang yang sama di dua negara akan sama. Dengan menyadari akan kenyataan ini kita telah menarik kesimpulan pula bahwa tidak bisa diharapkan perekonomian yang berbeda memiliki titik-titik pangkal kurva permintaan impor atau kurva penawaran ekspor untuk barang yang sama, tingginya sama.

Dengan titik pangkal permintaan impor (atau penawaran ekspor) yang tingginya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain, dapatlah dipastikan bahwa titik potong antara permintaan barang impor negara yang satu dengan penawaran ekspor negara yang lain untuk barang yang sama yang tergambar pada kuadran timur laut juga berbeda-beda ketinggiannya. Ini berarti bahwa semua barang bergerak akan tercakup sebagai barang dagangan; kalau tidak berupa barang impor, akan berupa barang ekspor.

Kita semuanya mengetahui bahwa dalam dunia yang nyata keadaannya tidaklah demikian. Tidak sedikit *barang-barang yang tidak diperdagangkan* yang biasa juga disebut *nontradables*, sekalipun barang tersebut merupakan barang bergerak, hal mana disebabkan oleh karena tidak menguntungkan untuk mengekspornya ataupun mengimpornya.

Menyimpangnya hasil analisis dari kenyataan seperti diungkapkan di atas, tidak lain disebabkan oleh karena dalam menggunakan model analisis kita menggunakan asumsi yang tidak realistis tadi, yaitu asumsi tidak adanya beban berupa biaya transpor, serta biaya-biaya lainnya yang timbul dari adanya transaksi perdagangan ekspor dan impor tersebut. Masalah ini tidak akan timbul setelah biaya-biaya tersebut kita masukkan pula ke dalam analisis.

Untuk menerangkan perdagangan antar-daerah atau antar-negara di mana ada beban ongkos transpor, kita pergunakan Gambar 8.5.1. Dalam gambar tersebut, untuk singkatnya semua biaya selain harga barang bersangkutan yang timbul dari adanya transaksi perdagangan, seperti misalnya ongkos transpor, asuransi, ongkos administrasi, biaya provisi, komisi, ongkos modal dan sebagainya kita jadikan satu dan kita sebut *ongkos transpor*. Semua macam pengeluaran ini, entah eksportir yang membayarkannya terlebih dahulu, yang menanggung beban adalah importir. Oleh importir beban ini nantinya dilimpahkan kepada para pembeli pemakai di dalam negeri. Dengan demikian *harga barang X di negara pengimpor tendensinya sama dengan harga barang X di negara pengeksport ditambah dengan 'ongkos transpor'*.

Dengan dimasukkannya 'ongkos transpor' ke dalam model, maka keadaan ekuilibrium akan tercapai apabila dipenuhi syarat-syarat:

- (a) harga di negara pengimpor lebih tinggi bila dibandingkandengan harga di negara pengeksport dengan perbedaan setinggi ongkos transpor per unit, dan
  - (b) pada harga-harga seperti yang diungkapkan pada syarat (a) tersebut di atas, jumlah kesediaan masyarakat negara pengimpor untuk mengimpor barang bersangkutan sama dengan jumlah kesediaan masyarakat negara pengeksport untuk mengeksportnya.
- Kalau ini diterangkan pada Gambar 8.5.1., uraian singkatnya adalah sebagai berikut :

#### **A. Model Dengan Menggunakan Kurva Pasar**

Yang dimaksud dengan kurva pasar di sini ialah kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar. Ongkos transpor per unit barang X adalah setinggi  $t$ , yang panjangnya sama dengan  $ed$ . Dengan ongkos transpor tersebut, maka variabel-variabel di bawah ini mempunyai nilai ekuilibrium :

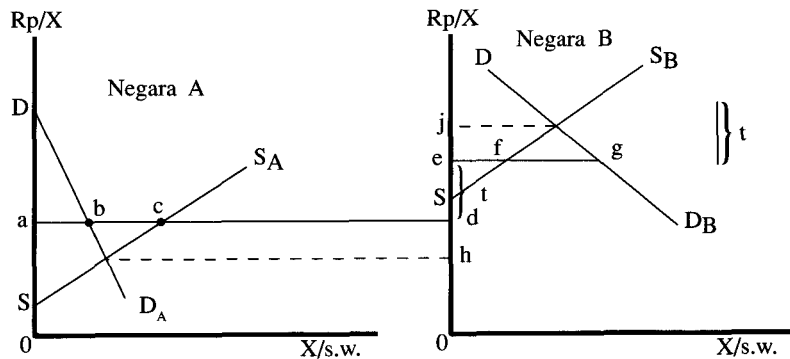
*Negara A :*

- (a) harga ekuilibrium :  $Oa/X$ ,
- (b) ekspor ekuilibrium :  $bc$  unit barang  $X/s.w.$
- (c) produksi ekuilibrium :  $ac$  unit barang  $X/s.w.$
- (d) konsumsi ekuilibrium :  $ab$  unit barang  $X/s.w.$

*Negara B :*

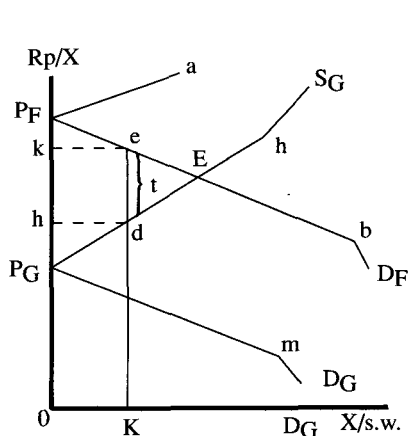
- (a) harga ekuilibrium :  $Oe/X$ ,
- (b) ekspor ekuilibrium :  $fg$  unit barang  $X/s.w.$
- (c) produksi ekuilibrium :  $ef$  unit barang  $X/s.w.$
- (d) konsumsi ekuilibrium :  $eg$  unit barang  $X/s.w.$

A. MODEL DENGAN MENGGUNAKAN KURVA PASAR

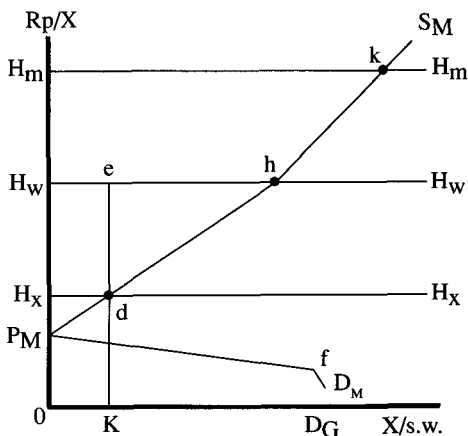


B. MODEL DENGAN MEENGGUNAKAN KURVA PERMINTAAN IMPOR DAN PENAWARAN EKSPOR.

B1. PERDAGANGAN ANTARDUA NEGARA



B2. PERDAGANGAN LUAR NEGERI DUA NEGARA PEREKONOMIAN KECIL



Gambar 8.5.1.: PERDAGANGAN DENGAN MENGGUNAKAN ONGKOS TRANSPOR.

## B. Model Dengan Menggunakan Kurva Permintaan Impor Dan Kurva Penawaran Ekspor

### B1. Perdagangan Antara Dua Negara:

Dari Gambar 8.5.1. B1., kita saksikan bahwa kurva penawaran ekspor barang X negara G, yaitu  $P_G \cdot hS_G$  berpotongan dengan kurva permintaan impor barang X negara F,  $P_F \cdot bD_F$ , pada titik E. Dengan adanya ongkos transpor, titik ini tidak lagi merupakan titik ekuilibrium. Mengingat bahwa dengan adanya ongkos transpor, harga ekuilibrium di negara pengimpor lebih tinggi daripada harga yang terjadi di negara pengekspor, maka dapat dipastikan bahwa titik-titik ekuilibrium berada di sebelah kiri titik E. Adapun kuantitas impor atau ekspor yang memenuhi syarat bahwa perbedaan harga di negara pengimpor dengan harga di negara pengekspor sama dengan tingginya ongkos transpor  $t$ , yang panjangnya sama dengan  $ed$ , adalah OK. Ini berarti bahwa dalam keadaan ekuilibrium :

- (a) Negara G mengekspor barang X sejumlah OK/s.w.
- (b) Harga ekuilibrium barang X di negara pengekspor G adalah setinggi Kd atau Oh/X.
- (c) Negara F mengimpor barang X sejumlah OK/s.w.
- (d) Harga barang X di negara pengimpor F adalah setinggi Ke atau Ok/X.
- (e) Nilai uang sejumlah hdek, yaitu sama dengan  $OK \times ed$ , merupakan biaya transpor total. Jumlah ini dapat dibayarkan langsung oleh pengimpor akan tetapi dapat pula dibayarkan dahulu oleh pengekspor, kepada perusahaan-perusahaan transpor, perusahaan asuransi, dan sebagainya.

### B2. Perdagangan Luar Negeri perekonomian Kecil

Pada Sub-bab 8.4. telah ditunjukkan bahwa untuk negara dengan transaksi perdagangan yang sangat kecil dibandingkan dengan transaksi perdagangan dunia untuk barang yang sama, menghadapi kurva permintaan sisa dunia akan barang bersangkutan yang relevan bagi negara tersebut *sangat elastik*. Demikian pula halnya dengan kurva penawaran sisa dunia yang relevan bagi negara tersebut; yaitu *sangat elastik*.

Hal yang sama dapat pula diuraikan dengan cara yang sedikit berbeda. Perekonomian dengan transaksi perdagangan yang relatif kecil dibandingkan dengan transaksi jual-beli barang yang sama di pasar dunia adalah menyerupai seorang konsumen menghadapi pasar, atau seorang produsen yang mempunyai bentuk pasar persaingan murni. Seperti kita ketahui, bagi seorang konsumen dalam menghadapi pasar dengan produk yang homogen, harga pembelian merupakan *datum*. Dalam keadaan seperti ini konsumen dapat disebut sebagai *price-taker*. Demikian pula bagi seorang produsen yang berbentuk pasar penjualannya merupakan pasar persaingan murni harga penjualan juga merupakan *datum*. Apabila produsen mau menjual barang hasil produksinya dengan harga yang berlaku di pasar maka ia dapat menjualnya sebanyak kemampuan perusahaannya untuk menghasilkan. Sebaliknya apabila ia menghendaki menjual hasil produksinya sedikit saja lebih tinggi daripada harga yang berlaku di pasar, ia tidak akan dapat menjualnya barang satu unit pun. Oleh karena itulah maka kurva penawaran yang relevan bagi seorang konsumen akan suatu barang mempunyai bentuk lurus sejajar dengan sumbu kuantitas. Begitu juga, dengan alasan yang sama, kurva

permintaan yang relevan bagi seorang produsen, yang sering pula disebut sebagai *kurva pendapatan hasil penjualan rata-rata* atau *average revenue curve*, juga elastik sempurna, yaitu sejajar dengan sumbu kuantitas.

Kalau kenyataan-kenyataan di atas kita terapkan pada *negara kecil* sebagai pembeli dan juga sebagai penjual di pasar dunia, maka dengan *harga yang berlaku* di pasar dunia, negara tersebut bisa mengimpor sebanyak yang dikehendakinya dan juga bisa mengekspor sebanyak yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa sebelum diperhitungkan biaya transpor, kurva permintaan dunia yang relevan bagi pengeksport berimpit dengan kurva penawaran sisa dunia yang relevan bagi pengimpor, dan sejajar dengan sumbu kuantitas. Pada contoh Gambar 8.5.1.B2.  $H_w H_w$  merupakan kurva penawaran sisa dunia akan barang X yang relevan bagi negara M dan juga sekaligus merupakan kurva permintaan sisa dunia akan barang X yang relevan bagi negara M *sebelum diperhitungkan ongkos transpor*. Kalau terhadap kurva  $H_w H_w$  kita *tambahkan* semua ongkos yang kita sebut *ongkos transpor import*, kita menemukan kurva  $H_m H_m$  yang menunjukkan tingginya harga impor netto per unit barang X. Sebaliknya apabila terhadap kurva  $H_w H_w$  kita *kurangkan* semua ongkos yang kita sebut sebagai *ongkos transpor ekspor*, maka hasilnya merupakan kurva  $H_x H_x$  yang menunjukkan tingginya penerimaan hasil ekspor bersih oleh produsen barang X untuk setiap unit yang berhasil diekspornya.

Titik k pada Gambar 8.5.1.B2., yang merupakan titik potong kurva  $H_m H_m$  dengan kurva penawaran ekspor  $P_M h_{S_M}$ , dari sudut pandang ekonomi tidak mempunyai arti yang penting. Sebab duanya merupakan kurva penawaran.

Sebaliknya titik d yang merupakan titik potong antara kurva permintaan sisa dunia  $H_x H_x$  dengan kurva penawaran ekspor  $P_M h_{S_M}$ , merupakan titik ekuilibrium. Pembeli dari sisa dunia di pasar dunia membeli barang X buatan negara M seharga Ke rupiah untuk setiap unitnya. Harga Ke ini dengan sendirinya dapat kita sebut sebagai *harga dunia* barang X dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dari sejumlah Ke rupiah tersebut ed rupiah merupakan 'ongkos transpor' per unit barang X yang terekspor. Sedangkan sisanya, yaitu setinggi Kd merupakan jumlah *hasil ekspor netto* yang diterima oleh produsen untuk setiap satuan barang X yang berhasil diekspornya.

Akhirnya, dari Gambar 8.5.1.B2., dapat ditunjukkan bahwa harga ekuilibrium barang X di negara M, yang dapat kita sebut sebagai *harga dalam negeri* adalah setinggi Kd untuk setiap unitnya.

## 8.6. Bea dan Subsidi

Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah sering membebaskan pungutan terhadap impor maupun ekspor barang dan jasa di mana secara langsung importir maupun eksportir yang dikenai pungutan tersebut tidak menerima balas-jasa langsung apapun. Pungutan ini biasa disebut *bea*, *tariff* atau *duty*. Bea yang dibebankan pada impor disebut *bea impor*, *import tariff* atau *import duty*, bea yang dibebankan pada ekspor disebut *bea ekspor*, sedangkan bea yang dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah pabean negara pemungut disebut *bea transit* atau *transit duty*.

Cukup banyak pengaruh ekonomi dari bea dan subsidi, antara lain ialah: pengaruhnya terhadap perdagangan, (yaitu yang dimaksud di sini *pengaruhnya terhadap ekspor dan atau impor*) yang sering disebut *trade effect*, pengaruh terhadap harga atau *price effect*, pengaruh terhadap konsumsi atau *consumption effect*, pengaruh terhadap produksi *production effect*, yang sebenarnya lazim disebut *protective effect*, pengaruh terhadap neraca pembayaran luar-negeri yaitu *balance of payments effect*, pengaruh terhadap pembagian pendapatan nasional atau *redistribution effect*, pengaruh terhadap kesempatan kerja atau *employment effect*, pengaruh terhadap dasar tukar atau *terms of trade effect*, dan pengaruh terhadap pendapatan negara, yang disebut juga *revenue effect*.<sup>6)</sup> Dari berbagai macam pengaruh *tariff* tersebut, hanya beberapa saja yang akan kita perhatikan, terutama ialah *trade effect* dan *price effect*.

Pengaruh pembebanan bea impor dan atau bea ekspor terhadap ekspor dan atau impor dan harga sebetulnya boleh dikatakan sama dengan pengaruh ongkos transpor. Hanya bedanya kalau ongkos transpor si penerima pembayaran adalah perusahaan transpor, perusahaan asuransi dan sebagainya di mana untuk pembayaran tersebut pihak penerima memberikan balas jasa langsung dalam bentuk jasa angkutan, jasa asuransi, jasa perbankan dan sebagainya, dalam hal bea si penerima adalah pemerintah, dan si pembayar bea tidak memperoleh balas jasa yang langsung.

Subsidi boleh dikatakan merupakan kebalikan dari bea. Kalau bea lebih lazim dikenakan pada impor, subsidi lebih lazim dikenakan pada ekspor, meskipun biasanya ada juga barang-barang yang dikenai bea ekspor atau dikenai subsidi impor. Subsidi merupakan pembayaran/pemberian uang oleh pemerintah kepada seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, di mana tidak ada balas jasa yang langsung. Seperti halnya dengan tarif, tinggi-rendahnya subsidi dapat ditetapkan dalam presentase terhadap nilai barang, yang diekspor atau diimpor, atau ditetapkan sekian rupiah untuk setiap satuan barang yang diimpor atau diekspor. Subsidi atau tarif yang dalam mengenakan menggunakan cara yang pertama disebut *subsidi* atau *tariff ad valorem*, sedangkan apabila cara kedua yang dipakai, maka sebutannya ialah *subsidi* atau *bea spesifik*.

Untuk singkatnya dalam kita mencoba menerangkan pengaruh bea dan subsidi terhadap ekspor, impor dan harga, kita pergunakan persamaan-persamaan atau definisi-definisi di bawah ini :

- (a)  $C_M = t_M + T_M - S_M$  ..... (8.6.1.)
- (b)  $C_X = t_X + T_X - S_X$  ..... (8.6.2.)
- (c)  $H_M = H_D + C_M = H_D + t_M + T_M - S_M$  ..... (8.6.3.)
- (d)  $H_X = H_D - C_X = H_D - t_X - T_X + S_X$  ..... (8.6.4.)

---

<sup>6)</sup>Uraian mengenai berbagai pengaruh bea impor secara grafik disajikan pada lampiran No. 2. Lihat hal. ....



harga ekuilibrium barang Z yang terjadi di negara pengimpor A. Dengan titik potongnya yang terdapat pada titik E, maka ini berarti bahwa dalam keadaan ekuilibrium negara A mengimpor barang X dari pasar dunia sebanyak  $H_M E$  per satuan waktunya.

Apabila bea impor dinaikkan menjadi  $ac/Z$ , maka impor barang Z negara A berkurang menjadi hanya sebanyak  $cF$  per satuan waktunya.

Sekarang bagaimanakah apabila pemerintah negara A mengenakan bea impor setinggi  $ah$ ? Dengan bea impor spesifik setinggi  $ah$ , nilai  $C_M$  menjadi  $H_D h$ . Garis yang menunjukkan hasil penjumlahan  $H_D$  dengan  $C_M$  terletak di atas titik pangkal garis permintaan impor dan atau penawaran ekspor  $H_A$ , yaitu setinggi  $Oh$ . Dengan demikian tidak lagi kita jumpai titik potong antara kurva permintaan impor barang Z negara A dengan kurva penawaran sisa dunia akan barang Z yang dapat dibeli oleh negara A. Maka ini berarti bahwa dengan ongkos transpor setinggi  $H_D a$  dan bea impor setinggi  $ah$  per unit, negara A tidak akan mengimpor ataupun mengekspor barang Z dan harga barang Z yang terjadi di negara A adalah setinggi  $OH_A$ .

Sekarang kita beralih memperhatikan bagian di bawahnya kurva harga pasar dunia barang Z. Dari Gambar 8.6.1. dapat disaksikan bahwa ongkos transpor ekspor, yaitu yang kita beri simbol  $t_x$ , tingginya adalah setinggi  $bH_D /Z$ . Kiranya mudah dipahami bahwa tingginya  $t_x$  dan  $t_m$  pada umumnya berbeda, akan tetapi perbedaan mana tidak besar. Garis  $bb$  ini tidak begitu berarti sebab negara A tersebut tidak mengekspor melainkan mengimpor. Demikian pula halnya apabila negara A mengenakan bea ekspor setinggi  $bm/X$ . Garis  $mm$  yang pada galibnya merupakan garis permintaan sisa dunia akan barang Z buatan negara A tidak berpotongan dengan kurva penawaran ekspor negara A akan barang Z, oleh karenanya titik potong tersebut tidak mempunyai relevansi.

Bagaimana kalau pemerintah negara A menyajikan subsidi ekspor; mungkinkah negara A tersebut kemudian bisa bertindak bukan sebagai negara pengimpor barang Z melainkan sebagai negara pengekspor? Jawabnya ialah mungkin, asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Subsidi ekspor harus cukup tinggi. Kalau misalnya pemerintah menginginkan negaranya mengekspor barang X sebanyak  $rs/s.w.$ , subsidi harus ditetapkan setinggi  $br/Z$ .
2. Pemerintah harus mencegah jangan sampai barang yang telah diekspor kembali memasuki perekonomian negara A lagi, dan juga jangan sampai penduduk negara A mengimpor barang Z dari pasar dunia. Pencegahan mengalirnya masuk barang Z tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan bea impor yang tinggi atau dengan menggunakan larangan impor atas barang Z tersebut.

## 8.7. Devaluasi Dan Revaluasi

Dalam uraian-uraian sebelumnya dipergunakan asumsi bahwa kurs dollar Australia dinyatakan dalam rupiah setinggi Rp 700/\$A. Dalam uraian-uraian tersebut secara implisit diasumsikan bahwa kurs tersebut tetap dan tidak dipengaruhi oleh nilai ekspor ataupun nilai impor. Keadaan seperti ini hanya terjadi kalau pemerintah mempergunakan sistem devisa di mana kurs devisa ditetapkan oleh pemerintah negara bersangkutan; misalnya *sistem pengawasan devisa* dan *sistem kurs tambahan*. Untuk sistem-sistem devisa macam lainnya

di mana tingginya kurs devisa ditentukan oleh mekanisme pasar, maka analisa parsial seperti yang diuraikan dalam bab ini tidak dapat dipakai secara umum. Hanya kalau kita menganalisis satu dua komoditi saja yang angka persentasenya terhadap nilai total perdagangan luar negeri *sangat kecil*, analisis parsial mungkin masih bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak menyesatkan.

Kelak pada bab-bab yang memperbincangkan masalah penyeimbangan kembali neraca pembayaran yang tidak seimbang, kita akan menemukan bahwa dalam sistem devisa di mana kurs devisa ditentukan oleh pemerintah, maka sebagai akibat adanya perubahan daya beli mata uang dalam negeri ataupun daya beli mata uang asing, pemerintah kadang-kadang perlu mengadakan penyesuaian kurs devisa. Dengan sendirinya ada dua kemungkinan penyesuaian, yaitu:

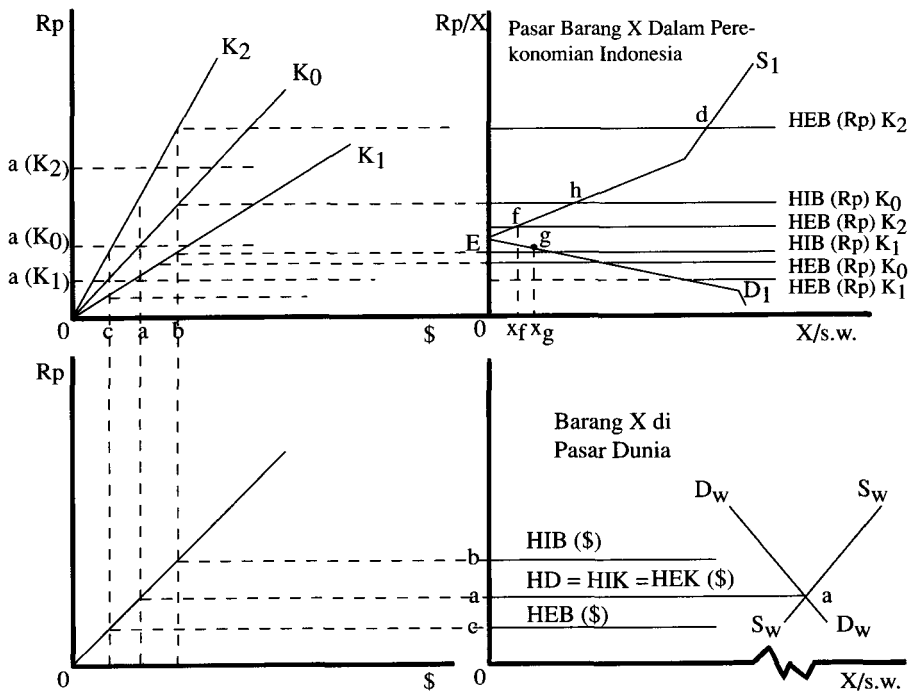
1. Apabila dirasakan mata uang dalam negeri dinilai terlalu tinggi, yaitu yang biasa disebut bahwa mata uang dalam negeri terdapat *overvalued*, maka ini berarti bahwa kurs valuta asing ditetapkan terlalu rendah, maka biasanya pemerintah meningkatkan tingginya kurs valuta asing. Tindakan pemerintah yang berupa meningkatkan kurs valuta asing dinyatakan dalam mata uang dari negara tersebut dapat disebut sebagai kebijaksanaan *devaluasi*.
2. Apabila dirasakan mata uang dalam negeri dinilai terlalu rendah dinyatakan dalam valuta asing, maka ini mempunyai makna bahwa kurs valuta asing sudah terlalu tinggi. Dalam keadaan seperti ini pemerintah biasanya mengambil kebijakan *revaluasi*, yaitu menurunkan kurs valuta asing, atau dengan kata lain mata uang sendiri nilainya terhadap mata uang asing dinaikkan. Dalam sejarah perekonomian kita belum pernah pemerintah melakukan kebijakan revaluasi.

Pengaruh devaluasi dan revaluasi mata uang rupiah secara hipotetik dapat diuraikan dengan menggunakan Gambar 8.7.1. Sebelum kita mulai dengan uraian tentang pengaruh devaluasi dan revaluasi terhadap ekspor, impor dan harga barang X terlebih dahulu kita tunjukkan singkatan dan tanda-tanda yang terdapat dalam gambar.

Seperti terlihat pada Gambar 8.7.1., kurs dollar mula-mula setinggi yang ditunjukkan oleh garis kurs  $OK_0$ . Pada kurs ini,  $(Oa)$  misalnya, mempunyai nilai sama dengan Rp  $Oa$  ( $K_0$ ). Pada periode ke 1, dengan kurs yang ditunjukkan oleh garis  $OK_1$ , nilai dollar sejumlah  $Oa$  hanya dihargai sama dengan Rp  $Oa$  ( $K_1$ ), yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Ini berarti bahwa mata uang rupiah, dinyatakan dalam dollar, nilainya naik. Hal yang sama bisa pula diungkapkan dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu kurs dollar turun. Tindakan pemerintah seperti ini dengan sendirinya merupakan apa yang kita sebut *kebijaksanaan revaluasi*.

Sebaliknya tindakan pemerintah yang secara langsung menggeserkan garis kurs devisa ke atas atau ke kiri, yaitu misalnya dari  $OK_1$  ke  $OK_2$  atau dari  $OK_0$  ke  $OK_2$ , adalah kebalikan dari tindakan revaluasi, dan disebut sebagai tindakan *devaluasi*; oleh karena seperti telah didefinisikan di muka, tindakan *devaluasi* merupakan tindakan pemerintah yang secara langsung menaikkan kurs valuta asing. Dengan melihatnya dari segi lain kebijakan *devaluasi*

dapat pula didefinisikan sebagai tindakan pemerintah yang secara langsung menurunkan nilai mata uang dalam negeri dinyatakan dalam valuta asing.



Gambar 8.7.1.: DEVALUASI DAN REVALUASI RUPIAH.

HD : Harga barang X di pasar dunia. HIK : Harga impor kotor. Harga ini tingginya sama dengan HD. HEK : Harga ekspor kotor. Harga ini tingginya juga sama dengan HD.

HIB : Harga ekspor bersih = HIK + biaya impor = HD + biaya impor

HEB : Harga ekspor bersih = HEK - biaya ekspor = HD - biaya ekspor.

(\$) : Harga dinyatakan dalam dollar.

(Rp) : Harga dinyatakan dalam rupiah.

$K_0, K_1, K_2$  berturut-turut : dengan kurs pada periode 0, period 1 dan periode 2.

Sekarang kita perhatikan bagaimanakah nilai-niali ekuilibrium pada periode dengan kurs  $OK_0, OK_1$  dan  $OK_2$ .

A. Periode 0 dengan kurs  $OK_0$  :

1. Kemungkinan Indonesia mengimpor barang X : Tidak mungkin, sebab kurva

HIB(Rp)K<sub>0</sub> yang merupakan hasil peng-rupiahan kurva HIB(\$)<sup>1</sup> tidak berpotongan dengan kurva permintaan impor barang X negara Indonesia, ED<sub>1</sub>.

2. *Kemungkinan Indonesia mengekspor barang X* : Ini juga tidak mungkin, oleh karena kurva penawaran ekspor ES<sub>1</sub> tidak berpotongan dengan kurva HEB(Rp)K<sub>0</sub>.
3. *Harga ekuilibrium barang X di Indonesia* : Oleh karena Indonesia tidak mengekspor dan juga tidak mengimpor barang X, maka harga ekuilibrium barang X di Indonesia setinggi harga yang ditunjukkan oleh titik potong antara kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar barang X, yaitu setinggi Rp(OE)/X.

**B. Periode 1 dengan kurs OK<sub>1</sub> :**

1. *Kemungkinan Indonesia mengekspor barang X* : Untuk ini kurva HEB(Rp)K<sub>1</sub> harus berpotongan dengan kurva penawaran ekspor ES<sub>1</sub>. Dalam gambar 8.7.1. titik tersebut tidak dijumpai. Oleh karena itu dengan kurs OK<sub>1</sub> Indonesia tidak mungkin mengekspor barang X.
2. *Kemungkinan Indonesia mengimpor barang X* : Untuk ini kurva HIB(Rp)K<sub>1</sub> harus berpotongan dengan kurva permintaan impor ED<sub>1</sub>. Ternyata pada gambar tersebut kedua garis tersebut saling berpotongan pada titik g. Ini berarti bahwa dalam keadaan ekuilibrium Indonesia mengimpor barang X sebanyak OX<sub>g</sub> tiap satuan waktunya.
3. *Harga ekuilibrium barang X di Indonesia* : Oleh karena dalam keadaan ekuilibrium Indonesia mengimpor barang X, maka harga ekuilibrium di Indonesia akan setinggi HIB(Rp)K<sub>1</sub>, yaitu harga impor bersih dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs valuta asing yang ditunjukkan oleh garis kurs OK<sub>1</sub> per satuan barang X.

**C. Periode 2 dengan kurs OK<sub>2</sub> :**

1. *Kemungkinan Indonesia mengimpor barang X* : Ini tidak mungkin, oleh karena kurva HIB(Rp)K<sub>2</sub> tidak berpotongan dengan kurva permintaan impor ED<sub>1</sub>.
2. *Kemungkinan Indonesia mengekspor barang X* : Untuk ini kurva HEB(Rp)K<sub>2</sub> harus berpotongan dengan kurva penawaran ekspor ES<sub>1</sub>. Ternyata pada gambar kedua kurva tersebut saling berpotongan pada titik f. Ini berarti bahwa dengan kurs OK<sub>2</sub>, pada keadaan ekuilibrium Indonesia mengekspor barang X sebanyak OX<sub>f</sub> unit untuk setiap satuan waktunya.
3. *Harga ekuilibrium barang X di Indonesia* : Oleh karena dalam hal ini Indonesia mengekspor barang X, maka harga ekuilibrium barang X di Indonesia akan setinggi HEB(Rp)K<sub>2</sub>, yaitu harga ekspor bersih dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs dollar setinggi yang diungkapkan oleh garis OK<sub>2</sub> per unit barang X.

Dari uraian di atas dapatlah kiranya ditarik beberapa kesimpulan tentang pengaruh devaluasi dan revaluasi rupiah. Devaluasi mempunyai tendensi meningkatkan volume ekspor, yaitu jumlah ekspor dinyatakan dalam satuan fisik; dan juga bertendensi menurunkan volume impor. Sebaliknya, revaluasi mempunyai tendensi menurunkan volume ekspor dan menaikkan volume impor.

Terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut kiranya perlu dimintakan perhatian akan dua hal:

1. Meskipun di atas dikatakan bahwa devaluasi bertendensi meningkatkan volume ekspor, ini tidak berarti bahwa pendapatan total valuta asing pasti meningkat, hal mana tergantung pada elastisitas permintaan sisa dunia akan barang X buatan Indonesia. Dalam contoh Gambar 8.7.1. kurva permintaan tersebut elastis sempurna, sehingga tidak hanya bisa disimpulkan bahwa devaluasi akan mengakibatkan meningkatnya ekspor, baik dalam volume maupun dalam hasil penerimaan dollar, tetapi bahkan dapat dikatakan pula bahwa persentase kenaikan hasil penerimaan dollar akan sama dengan prosentase kenaikan volume ekspor.
2. Meningkatnya volume impor sebagai akibat kebijakan revaluasi dan menurunnya volume impor sebagai akibat kebijakan devaluasi, dengan asumsi *ceteris paribus*, dapat dipastikan akan terjadi. Apabila penawaran sisa dunia akan barang yang dapat kita impor mempunyai elastisitas yang tidak terhingga seperti yang digambarkan pada Gambar 8.7.1., maka menurunnya volume impor selalu berarti juga menurunnya jumlah valuta asing yang dipergunakan untuk mengimpor barang tersebut. Sebaliknya, meningkatnya nilai impor tidak selalu berarti bahwa jumlah *pengeluaran rupiah* oleh importir seluruhnya meningkat, mungkin juga bahkan menurun; hal mana tergantung kepada tinggi-rendahnya elastisitas permintaan akan barang impor. Apabila permintaan tersebut elastis, maka kenaikan impor dinyatakan dalam valuta asing akan dibarengi oleh meningkatnya pengeluaran rupiah importir. Akan tetapi sebaliknya, apabila permintaan impor dalam keadaan inelastis, peningkatan nilai impor dinyatakan dalam valuta asing akan dibarengi oleh menurunnya pengeluaran rupiah importir. Untuk kasus devaluasi, yang seperti kita ketahui akan mengakibatkan menurunnya volume impor, mengenai jumlah pengeluaran importir dalam rupiah, juga bisa meningkat dan pula bisa menurun; tergantung pada tingginya elastisitas permintaan impor. Kalau elastis, maka menurunnya volume impor tersebut akan dibarengi oleh menurunnya pengeluaran rupiah importir. Sebaliknya apabila inelastis, maka penurunan volume impor akan dibarengi oleh meningkatnya jumlah pengeluaran rupiah oleh importir.
3. Kesimpulan-kesimpulan yang kita peroleh di atas didasarkan hanya pada hasil analisis ekuilibrium parsial. Khususnya apabila kita ingin mengetahui pengaruh jangka panjang devaluasi dan revaluasi, kita perlu meninjaunya dengan menggunakan juga pendekatan yang lain, misalnya *pendekatan keseimbangan umum* yaitu yang biasa disebut juga *general equilibrium analysis*.

Memperbincangkan pengaruh devaluasi terhadap neraca pembayaran, khususnya dengan menggunakan pendekatan elastisitas, kiranya baru teras lengkap apabila masalah tersebut kita soroti dengan menggunakan konsepsi *syarat Marshall-Lerner* atau *Marshall-Lerner condition*.

Menurut hasil analisis Alfred Marshall, yang selanjutnya dikembangkan dan dipopulerkan oleh Abba P. Lerner, disimpulkan bahwa devaluasi akan berhasil memperbaiki neraca pembayaran apabila dipenuhi syarat hasil penjumlahan koefisien elastisitas permintaan luar

negeri akan komoditi ekspor negara yang melakukan devaluasi dengan koefisien elastisitas permintaan dalam negeri akan komoditi impor lebih besar daripada satu. Apabila angka hasil penjumlahan tersebut persis sebesar satu, maka neraca pembayaran posisinya tidak akan mengalami perubahan. Sebaliknya apabila hasil penjumlahan tersebut lebih kecil daripada satu, maka tindakan devaluasi justru akan mengakibatkan defisitnya neraca pembayaran.

Terhadap kesimpulan teoritik tersebut perlu kiranya dicatat bahwa di balik kepopulerannya dijumpai keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyesatkan bilamana kita melupakannya :

1. Kesimpulan teoritik tersebut didasarkan pada asumsi bahwa baik penawaran ekspor negara tersebut maupun penawaran luar negeri akan komoditi impor negara yang melakukan devaluasi keduanya elastis sempurna.
2. Kesimpulan teoritik tersebut juga didasarkan pada asumsi bahwa pada mulanya keadaan neraca pembayaran negara yang melaksanakan devaluasi dalam keadaan seimbang, yaitu tidak defisit maupun surplus.

Apabila salah satu atau kedua ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka sekalipun syarat Marshall-Lerner tersebut di atas terpenuhi dengan sempurna, tidaklah dapat dipastikan devaluasi akan dapat memperbaiki neraca pembayaran.

### **SOAL-SOAL LATIHAN**

Lingkarilah salah satu di antara huruf A, B, C dan D, yang menurut pendapat Anda paling tepat dihubungkan dengan bagian kalimat yang mendahuluinya.

1. Tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi nilai salah satu atau beberapa pos neraca pembayaran negaranya disebut :
  - A. kebijakan perdagangan luar negeri
  - B. kebijakan ekonomi luar negeri
  - C. kebijakan neraca perdagangan
  - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
2. Jenis bea yang dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah pabean negara pemungut disebut bea :
  - A. transito
  - B. impor
  - C. ekspor
  - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
3. Jika suatu barang X merupakan barang import yang dikenakan bea, maka harganya menjadi lebih tinggi. Pengaruh ini disebut sebagai :
  - A. efek proteksi
  - B. 'trade effect'
  - C. 'price effect'
  - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
4. Yang disebut sebagai biaya proteksi adalah :
  - A. penurunan surplus konsumen yang tidak diimbangi oleh peningkatan pemanfaatan baik oleh pemerintah dalam bentuk 'tariff revenue' ataupun oleh produsen dalam surplus produsen

